PENGALOKASIAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH PUSAT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KONDISI DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2019

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Diploma III Program Studi Keuangan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

> DisusunOleh : Shindi Kholisafani 14010316060020

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

JudulTugasAkhir

: Pengalokasian Dana Desa Oleh Pemerintah Pusat

dengan Mempertimbangkan Kondisi Daerah Pada Tahun Anggaran 2019

Nama Penyusun

: Shindi Kholisafani

Program Studi

: Diploma IIIKeuanganPublik

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma III Universitas Diponegoro

Semarang, 15 Agustus 2019

Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Drs, Hardi Warsono, M.T.P

Dr. Drs. Teguh Yawono, M.Pol.Admin

NIP. 19640827 199001 1 001

NIP. 19690822 199403 1 003

DosenPembimbing:

1. Lusia Astrika S.IP, M.Si.

di.

DosenPenguji:

- 1. Supratiwi S.Sos,. M.Si.
- 2. Lusia Astrika S.IP, M.Si.

(**G**)

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: Shindi Kholisafani

Nomor Induk Mahasiswa

: 14010316060020

Tempat / Tanggal Lahir

: Bekasi, 22 Februari 1998

Jurusan / Program Studi

: D-III Keuangan Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi / TA) yang saya tulis berjudul :

Pengalokasian Dana Desa oleh Pemerintah Pusat Dengan

Mempertimbangkan Kondisi Daerah Pada Tahun Anggaran 2019

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain.

Apabila di kemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil jiplakan karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggungjawab.

Semarang, 15 Agustus 2019

PembuatPernyataan

Shindi Kholisafani

NIM. 14010316060020

ABSTRAKSI

Judul : Pengalokasian Dana Desa Oleh Pemerintah Pusat dengan

Mempertimbangkan Kondisi Desa Tahun Anggaran 2019

Nama : Shindi Kholisafani

NIM : 14010316060020

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis dalam penguatan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Salah satu bentuk transfer ke daerah yaitu terkait Dana Desa. Berdasarkan hasil evaluasi empat tahun terakhir pelaksanaan Dana Desa, pengalokasian Dana Desa dinilai belum terbagi secara merata dan berkeadilan.Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya daerah-daerah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin karena porsi perhitungan Alokasi Dasar masih sangat besar.Maka dari itu, perlu adanya perubahan formulasi yang digunakan dalam perhitungan pengalokasian Dana Desa untuk tahun anggaran 2019 agar semakin tercipta pemerataan dan keadilan.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi pustaka dan wawancara.Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2019 telah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Hal ini dapat dilihat dari formula yang digunakan dalam perhitungannya, yang mana porsi Alokasi Dasar dikurangi dan porsi Alokasi Formula dinaikan. Pada pengalokasian Dana Desa tahun 2019, daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh sebesar 7.889.431.604.000dengan terbanyak yaitu Rp Kabupaten/Kota tertinggi yaitu Kabupaten Brebes sebesar Rp 441.009.459.000 dan terendah Kabupaten Kudus sebesar Rp 139.077.753.000, sedangkan untuk Provinsi yang memperoleh Dana Desa terkecil yaitu Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 261.333.056.000dengan daerah Kabupaten/Kota tertinggi yaitu Kabupaten Lingga sebesar Rp 67.863.809.000dan terendah Kabupaten Bintan sebesar Rp 36.845.062.000. Untuk itu pemerintah tetap harus melakukan evaluasi setiap tahunnya agar pengalokasian Dana Desa semakin menyesuaikan kebutuhan tiap desa dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa akan semakin meningkat.

Pengalokasian Dana Desa yang telah dilakukan tentunya sudah banyak mengurangi permasalahan yang ada di desa-desa di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut masih perlu dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan dalam proses pengalokasiannya khususnya pada formula yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa untuk tahun anggaran 2019 agar kemiskinan dan kesenjangan semakin teratasi oleh pemerintah.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengalokasian, Formula Perhitungan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "Pengalokasian Dana Desa Oleh Pemerintah Pusat dengan Mempertimbangkan Kondisi Daerah pada Tahun Anggaran 2019".

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Keuangan Publik FakultasIlmuSosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Selama mengikuti pendidikan di Program Studi Diploma III Keuangan Publik sampai dengan proses penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan tugas akhir ini tidak akan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- Bapak Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Ibu Nunik Retno H, S.Sos., M.Si selaku KetuaJurusan Program Studi Diploma III Keuangan Publik.
- 3. Bapak Dzunuwanus Ghulam ManarS.IP, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Keuangan Publik.

4. Bapak Dzunuwanus Ghulam ManarS.IP, M.Si selaku DosenWali.

5. Lusia Astrika S.IP, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan

arahan, bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan laporan Tugas Akhir.

6. Ibu Supratiwi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji.

7. Bapak Subandono selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang telah

memberi kesempatan kepada penulis untuk magang di tempat tersebut.

8. Kepada seluruh staff harmonisasi kebijakan dan peraturan DJPK yaitu mas

aldo, mbak nabila, mas is, mas pur, mas alam, mba alit, mba ayu, mas udin

yang telah membimbing penulis selama magang dan penelitian.

9. Untuk Papa, Mamah, Kakak, dan Adik yang selalu memberi dukungan serta

kasih sayang kepada penulis.

10. Untuk semua sobat cikhos online, teman, sahabat, Mentari, Agnes, Tiwi, Butet,

Jihan, Irindah, Thera, Azizah, Muallif dll yang selalu mendukung dan memberi

semangat kepada penulis sehingga penelitian ini dana terselesaikan.

11. Seluruh keluarga besar D3 Keuangan Publik yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu, terimakasih atas setiap kebersamaan yang kita miliki.

Semarang, 15 Agustus 2019

PembuatPernyataan

Shindi Kholisafani

NIM. 14010316060020

vi

MOTTO

"Sebaik-baiknya Manusia Ialah Mereka Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan Tugas Akhir ini untuk:

- Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas karunia dan kehendak-Mu Ya Allah.
- Papa, Mamah, Kakak, Adik, terimakasih untuk dukungan, cinta dan kasih serta doa yang selalu menyertai pengorbanan yang telah diberikan selama ini.
- Untuk semua sobat cikhos online, teman, sahabat yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan serta kebersamaan selama mengikuti di perkuliahan.
- 4. Dan semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUANii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIRiii
ABSTRAKSIiv
KATA PENGANTAR v
MOTTOvii
PERSEMBAHANviii
DAFTAR ISIix
DAFTAR TABELxii
DAFTAR GAMBARxiii
DAFTAR LAMPIRANxiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang1
1.1 Latar Belakang11.2 Rumusan Masalah7
1.2 Rumusan Masalah
1.2 Rumusan Masalah
1.2 Rumusan Masalah
1.2 Rumusan Masalah 7 1.3 Tujuan Penelitian 8 1.4 Manfaat Penelitian 8 1.5 Tinjauan Pustaka 9
1.2 Rumusan Masalah
1.2 Rumusan Masalah71.3 Tujuan Penelitian81.4 Manfaat Penelitian81.5 Tinjauan Pustaka91.5.1 Desentralisasi91.5.2 Desentralisasi Fiskal10

1.6 Metode Penelitian 15	5
1.6.1 Metode Kualitatif	6
1.7 Jenis Data	7
1.8 Teknik Pengumpulan Data	8
1.9 Sistematika Penulisan	1
BAB II GAMBARAN UMUM23	3
2.1 Gambaran Umum DKI Jakarta	3
2.1.1 Luas Wilayah	5
2.2 Gambaran UmumDJPK 26	6
2.2.1 Struktur Organisasi DJPK	0
2.2.1.aSesditjen	1
2.2.1.bDirektorat Pembiayaan Dan Transfer Non Dana Perimbangan	0
2.2.1.c Direktorat Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah	1
BAB III PEMBAHASAN44	4
3.1 Dasar Hukum Pengalokasian Dana Desa	4
3.2 Pengalokasian Dana Desa Tahun 2015-2018	4
3.3 Pengalokasian Dana Desa Tahun 201947	7
3.4 Alur Pengalokasian Dana Desa Tahun 2019	2
3.5 Penyaluran Dana Desa)
BAB IV PENUTUP79	9
4.1 Kesimpulan	9
4.2 Saran	1

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pagu Anggaran dan Rata-rata Per Desa pada Tahun Anggaran
	2015-2017
Tabel 1.2	Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran 2018 5
Tabel 3.1	Formula Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran
	2015-2017
Tabel 3.2	Capaian <i>Output</i> Dana Desa Tahun Anggaran 2018
Tabel 3.3	Pagu Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 55
Tabel 3.4	Rincian Dana Desa Yang Diperoleh Tiap Provinsi beserta Presentase dari Total Keseluruhan Pagu Anggaran Dana Desa Tahun 2019
Tabel 3.5	Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 201760
Tabel 3.6	Data Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018
Tabel 3.7	Rincian Dana Desa di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 201964
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 201866
Tabel 3.9	Data Luas Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 201767
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kudus
	Tahun 2009 - 201768
Tabel 3.11	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kudus
Tahun 2009 -	- 201769
Tabel 3.12	Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 201870
Tabel 3.13	Rincian Daerah Yang Mendapat Dana Desa di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 201971
Tabel 3.14	Perubahan Penyaluran Dana DesaPerubahan Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD74
Tabel 3.15	Perubahan Penyaluran Dana DesaPerubahan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Provinsi DKI Jakarta	24
Gambar 2.2	Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	29
	Grafik Peningkatan Pagu Anggaran Dana Desa	
Gambar 3.2	Alur Perhitungan Dana Desa Tahun Anggaran 2019	.54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1Surat Jawaban Permohonan Ijin Magang	86
Lampiran 2 SuratTelah Melaksanakan Penelitian	87
Lampiran 3 Wawancara	88
Lampiran 4 Rincian Dana Desa Kabupaten/Kota TA 2019	89